



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERSON BARTHEL ADEN**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK**
3. NHK : **177318**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.285.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. Tanah Seluas 410 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, WARISAN Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 990 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 175.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 4750 m2/70 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
8. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 32.500.000

1. MOBIL, NISSAN TERRANO MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOTOR, SUZUKI MATIC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 78.750.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	281.309.379
F. HARTA LAINNYA	Rp.	6.000.000
Sub Total	Rp.	1.683.559.379
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.683.559.379

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.